



Buletin Parlementaria

Nomor 975/IX/2017 • September 2017



**Freeport Harus Tunduk
Hasil Renegosiasi**

**Setiap Lembaga Negara
Harus Junjung Tinggi
Check and Balances**

**DPR Masih
Dipercaya Untuk
Salurkan Aspirasi**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

“Hal ini menunjukkan bahwa DPR masih merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi. Seluruh pengaduan atau aspirasi yang masuk ke DPR, baik melalui surat, website, maupun SMS, telah diteruskan kepada komisi terkait,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-2017 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-72 DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Selain itu, Novanto menambahkan, pengaduan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR saat ini telah difasilitasi dalam berbagai bentuk dan media, termasuk kunjungan langsung, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR terkait.

“Perubahan terpenting dalam penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat adalah diberlakukannya sistem satu pintu atas pengelolaan surat aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR, baik yang ditujukan kepada Ketua DPR, Pimpinan AKD, maupun surat yang bersifat tembusan,” tambah Ketua Umum Partai Golkar itu.

Selama Tahun Sidang 2016-2017 fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat dan kunjungan kerja, baik pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik berdasarkan isu yang berkembang. Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPR yang bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang disepakati dan disetujui.

“Fungsi pengawasan juga dilaksanakan terkait permasalahan yang belum dapat diselesaikan pemerintah sampai saat ini. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan DPR merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan,” tambah Novanto.

Politisi asal dapil NTT itu memaparkan, selama Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) non-RUU, yaitu Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II dan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK.

Selain itu, DPR juga telah



Ketua DPR Setya Novanto memberikan Buku Laporan Kinerja DPR kepada Mantan Ketua DPR, Agung Laksono

DPR Masih Dipercaya Untuk Salurkan Aspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat RI sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 telah menerima 4.173 surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR maupun Komisi serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat. Berbagai pengaduan atau aspirasi masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pengawasan, dengan kegiatan antara lain RDP, RDPU, dan kunjungan kerja.

membentuk tujuh Tim Pengawas, antara lain Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

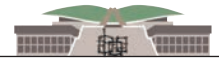
“Pansus dan Tim Pengawas merupakan bentuk komitmen DPR dalam rangka memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan memberikan kepastian pelayanan

dan hukum kepada masyarakat,” kata Novanto.

Selanjutnya, DPR juga membentuk 65 Panitia Kerja (Panja) pada Alat Kelengkapan DPR dan 13 Panja di antaranya telah menyelesaikan tugas serta menghasilkan rekomendasi. Selain itu, DPR melalui Komisi telah memberikan pertimbangan dan persetujuan pengangkatan terhadap 15 (lima belas) pejabat publik.

“DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat atau organisasi internasional dalam rangka memperkuat eksistensi Indonesia di kancah internasional,” imbuhnya. ■

(sl.mp) Foto: Oji, Andri/tnr



Penguatan Lembaga Legislatif Terus Dilakukan

Penguatan kelembagaan DPR sebagai lembaga legislatif terus dilakukan hingga Tahun Sidang 2016-2017. Seluruh kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini dapat dilihat berdasarkan implementasi kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR.



Ketua DPR RI, Setya Novanto

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Setya Novanto saat Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-2017 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-72 DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

“Pimpinan DPR turut aktif memastikan seluruh kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kinerja DPR melalui penyusunan blue print reformasi DPR yang disusun oleh Tim Implementasi Reformasi DPR,” kata Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, dalam rangka penguatan kelembagaan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga terus berusaha mewujudkan integritas dan akuntabilitas Anggota DPR melalui penegakan Kode Etik DPR. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kehormatan Anggota DPR.

Seiring dengan semangat DPR untuk melakukan reformasi dan dinamika kerja yang sangat tinggi, sistem pendukung DPR yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR turut meningkatkan kinerjanya. “Salah satu upaya perbaikan kinerja dituangkan dalam rencana reformasi birokrasi yang komprehensif, mulai dari pengembangan sumber

daya manusia, tata kelola, sarana dan prasarana, serta anggaran,” imbuh Novanto.

Upaya serius DPR untuk menjadi lembaga yang mudah diakses oleh publik telah membuahkan hasil. Novanto memastikan, hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian objektif dari sebuah lembaga penyedia jasa pengembangan teknologi di Jerman (GIZ) untuk AIPA bahwa DPR menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen se-Asia Tenggara.

Aktivitas diplomasi parlemen juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR. Di berbagai kesempatan, baik dalam sidang-sidang formal antar parlemen dan non-parlemen, serta melalui aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral, DPR secara aktif dan konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dan menaruh perhatian pada isu-isu internasional.

“Bahkan DPR juga diberi kepercayaan untuk memimpin jabatan penting di beberapa organisasi parlemen internasional seperti di IPU dan GOPAC,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Selama Tahun Sidang 2016-2017 pun, isu-isu internasional yang menjadi perhatian DPR. Diantaranya isu pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, perdagangan internasional, keamanan maritim, keamanan kawasan, penegakan HAM, perdamaian di Timur Tengah, serta isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Sementara itu, untuk mendukung penguatan kerja sama bilateral, DPR telah mengadakan pertemuan bilateral dengan parlemen negara sahabat, antara lain menerima kunjungan Ketua Parlemen Republik Korea, Ketua Parlemen Arab Saudi, Ketua Parlemen Thailand, dan Ketua Parlemen Bahrain,” tutup Novanto. ■

(s/imp), Foto: Andri/hr

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**
Bagus Mudjiharjanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- STAF PRODUKSI**
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
- DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
- ADMINISTRASI**
Sjaefudin, S.Sos
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Mujiono
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Tak Hanya Kritik Rakyat Perlu Terjun ke Politik

Merefleksikan HUT DPR yang ke 72 tahun, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah memaparkan beberapa hal berkaitan dengan cabang kekuasaan legislatif. Tak hanya kritik, Taufik ajak masyarakat terlibat dalam politik. Negara ada dalam daulat rakyat, lewat jalur demokrasi rakyat sebagai penentu, mau dibawa kemana bangsa ini berlabu. Lewat kritik yang konstruktif, dilanjutkan dengan penerimaan saran arif, legislatif akan semakin maju.



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan (kiri) dan Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah (kanan)

“Ayo kalo perlu masyarakat yang selalu mengkritisi, menjadi anggota DPR dengan pilihan partai politik masing-masing. Artinya ini milik rakyat, oleh rakyat, ya untuk rakyat. Terlepas dari hal lain tentunya kita harapkan seluruh masyarakat animonya menjadi anggota DPR

“Dulu belum ada media sosial, belum ada facebook, twitter, dan line. Orang kalo mau komunikasi hanya SMS, ini era reformasi, tapi sekarang dengan kondisi kemajuan teknologi informasi ini sedemikian cepat sekali,” jelasnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi

itu suatu ketika berjalan seimbang dengan proses elektoral terbuka yang sudah menjadi tradisi dua periode ini,” papar Taufik di hadapan para awak media, di Ruang Abdul Muis, Selasa (29/8).

Taufik menjelaskan, DPR pasca Reformasi 98 semakin transparan, segala macam aktifitas anggota dewan bisa terekam, disaksikan semua kalangan. Tranparansi informasi ini didukung oleh kemajuan teknologi yang menjadi pilar penentu demokrasi.

informasi saat ini kata Taufik, maka membangun demokrasi yang maju membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kemajuan itu sendiri. Hanya saja hal itu selalu dikaitkan dengan politik.

“Sehingga dalam refleksi 72 tahun yang sekarang ini, memang berbicara dengan kaitan demokrasi kita. Selain dalam teknologi dan elektoral juga semua ini terkait bagaimana istilah itu kita ingin melihat bahwa dengan kemajuan teknologi informasi ini sedemikian mudah orang menyampaikan pendapat maupun aspirasi-aspirasi pemikiran politiknya,” ungkap Taufik.

Di sisi lain, kritik pada DPR selama ini menurut Fahri Hamzah, karena tradisi politik Indonesia bukan daulat rakyat, tapi daulat kerajaan. “Federasi, kesultanan, dan yang dipertuan agung seperti Malaysia. Dan, Indonesia tak mengambil sistem kesultanan itu, tapi demokrasi Pancasila,” ungkapnya.

Bahkan kata Fahri, Indonesia pernah mengambil demokrasi liberal, presidensialisme sehingga posisi rakyat lemah dan eksekutif lebih dominan. “Kalau mau blak-blakan, eksekutif itu absolut karena mereka ini mengendalikan uang negara secara 100%,” katanya.

Namun demikian Fahri menyatakan kebanggaannya ketika di daerah DPR mendapat pujian masyarakat karena dana desa yang diperjuangkan melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang dana desa sudah terealisasi dan dinikmati masyarakat desa.

“Rakyat di desa mengelu-elukan DPR karena sukses memperjuangkan dana desa. Sebab, kalau tak ada UU Dana Desa, maka mereka tak bisa menikmati dana desa yang Rp 60 triliun itu,” pungkasnya. ■

(eko), Foto: Rumi/hr

Kenaikan Dana Parpol Diprioritaskan Untuk Pendidikan Politik

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1000. Menurutnya, kenaikan dana parpol bisa dimanfaatkan sebagai bentuk tanggung jawab parpol untuk menciptakan kader berintegritas dengan memberikan pendidikan politik.



Wakil Ketua DPR Korekku, Taufik Kurniawan



DPR Terima RATBI 2018

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Bidang Korekku Taufik Kurniawan menerima Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Anggaran Operasional Tahun 2018. DPR mengapresiasi langkah Gubernur BI Agus Martowardojo yang memulai tradisi tersebut.

“Kami mengapresiasi adanya suatu tradisi yang baru dari BI, yang menyampaikan anggaran tahun BI secara rutin setiap tahunnya,” ungkap Taufik usai menerima Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Taufik, penyerahan RATBI ini akan menjadi satu dalam rangkaian proses pembahasan anggaran 2018 di Komisi XI dan Badan Anggaran, yang mana BI juga akan menyuguhkan data persandingan dengan data dari Badan Pusat Statistik terkait laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2018.

“Ataupun terkait dengan inflasi dan segala macam yang terkait dengan makro ekonomi sehingga persandingan data semakin lebih memperkuat dan mempertajam akurasi data teman-teman di Komisi XI manakala ditetapkan asumsi makro,” jelas Taufik

Dalam kesempatan tersebut, Agus Martowardojo juga menyampaikan kondisi perekonomian negara secara umum. Menurutnya, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam

keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan berada di angka 5,01 persen. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi Indonesia masih aman. Sebab, inflasi berada di kisaran 4 persen pada 2017.

Sementara dari segi neraca pembayaran, Agus mengatakan Indonesia berada dalam kondisi surplus. Kondisi rupiah terhadap dolar juga mengalami apresiasi.

“Kita lihat neraca pembayaran Indonesia dalam kondisi surplus. Tahun ini, rencananya ada di US\$ 7 miliar surplus. Kita lihat bahwa nilai tukar rupiah pada 2016 menunjukkan kondisi yang apresiasi terhadap dolar dan kinerja rupiah itu yang terbaik di Asia Pasifik,” jelas Agus.

“Perencanaan 2018 sudah kami suguhkan dalam dokumen kita harapkan anggaran ini bisa dibahas



Wakil Ketua DPR Korekku (tengah) didampingi Anggota Komisi XI Misbakhun (kiri) dan Gub.BI Agus Martowardojo (kanan) saat konferensi pers

dan disetujui, sehingga akan membuat lembaga negara BI bekerja dengan baik untuk menjalankan fungsi moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan peredaran uang rupiah,” sambung mantan Menteri Keuangan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu. ■

(ann/so), Foto: Rumi/ik

Sisi lain, kenaikan bantuan dana parpol tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian dan dukungan moril pemerintah terhadap parpol. “Kita tidak melihat besaran atau jumlahnya kenaikan dana parpol tapi ini bentuk atensi pemerintah dan dukungan moril terhadap parpol,” ujar Taufik Kurniawan usai menerima Gubernur BI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/08).

Sebagaimana fungsi parpol, menurut Taufik, penggunaan dana bantuan parpol untuk pendidikan politik bisa melahirkan calon pemimpin bangsa

yang berkarakter dan berintegritas. Terlebih lagi, menjelang pemilu terbuka pada 2019.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemanfaatan dana bantuan parpol juga berkaitan dengan proses elektoral. Pada tahap pra elektoral, dana itu akan digunakan untuk materikulasi bagi kader jelang pileg dan pilpres. Sehingga pada saat terpilih, caleg tersebut mengerti apa yang harus dikerjakan.

“Kita tidak ingin seorang dilantik menjadi eksekutif dan legislatif tidak paham apa yang diamanahkan voters melalui pesta demokrasi,” papar Taufik.

Kemudian, pada tahap elektoral, dana tersebut bisa digunakan untuk berkompetisi secara sehat dalam mencari simpati masyarakat terutama untuk pembekalan saksi suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Ketiga, pasca elektoral, setiap parpol bisa mengamankan suaranya masing-masing melalui kader yang dibentuk, sehingga dana parpol ini menjadi hal yang penting manakala berkaitan dengan kaderisasi dan elektoral,” tandas politisi PAN ini. ■

(ann), Foto: Jaka/hr



Sekjen DPR Tetapkan 57 ASN Penerima Satya Lencana Karya Satya

Deputi Persidangan, Damayanti menyerahkan hadiah kepada salah satu pegawai berprestasi, Kabag. Media Cetak dan Media Sosial DPR Moh. Djazuli Foto: Eka/jk

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam apel peringatan hari ulang tahun DPR, Setjen DPR RI menyerahkan penghargaan satya lencana karya satya kepada sekitar 57 ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan DPR RI atas masa baktinya selama 10, 20, dan 30 tahun. Tidak hanya itu, dari ribuan pegawai, terpilih lima pegawai berprestasi, yakni Moh. Djazuli, Toto Rasmono, Sandra, M. Yunus, Paino dan Agus Utari. Kelimanya mendapat berbagai hadiah menarik, termasuk libur selama tiga hari di hari kerja.

“Penerapan dari reformasi birokrasi itu memiliki konsekuensi reward and punishment. Dan *reward* atau penghargaan yang saat ini saya terima ini sebenarnya bukan karena

saya pribadi, melainkan kerja tim, saya bersama teman-teman, khususnya seluruh anggota Koperasi. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada semuanya. Apa yang saya terima ini

merupakan awal untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga ke depan memacu saya untuk kerja lebih baik lagi bersama teman-teman,” ungkap Djazuli, penerima penghargaan pegawai berprestasi karena



jasanya memajukan Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI, sehingga menerima predikat sebagai satu-satunya Koperasi Pegawai Terbaik dari Kementerian Koperasi dan UKM. Serta predikat Koperasi terbaik se-DKI Jakarta dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

Dijelaskan Djazuli yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI ini, penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini dilakukan secara nasional. Adapun kriteria penilaiannya dari tiga sisi, yakni pengelolaan, keterbukaan dan keuntungan.

Koperasi Setjen dan BK DPR RI ini sejak beberapa tahun belakangan ini memang dikelola secara profesional, hal tersebut ditandai dengan mengangkat dua manager dan satu kepala bagian. Bahkan koperasi tersebut juga memiliki binaan sekitar 26 UKM.

Penilaian kedua adalah keterbukaan. Hal ini sangat diutamakan oleh Djazuli selaku Kepala Koperasi Setjen dan BK DPR RI mengingat koperasi tersebut merupakan milik semua anggota koperasi, sehingga diperlukan sebuah keterbukaan. Hal itu dibuktikan dengan transparansi yang bisa dilihat secara online. Dengan demikian anggota koperasi dapat melihat berapa keuntungan yang diterima koperasi dan berapa SHU yang dimilikinya. Bahkan, di sana anggota koperasi juga dapat memberikan saran atau kritik terkait pelayanan yang diberikan koperasi terhadap anggotanya.

“Dan penilaian yang ketiga atau terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah terkait keuntungan yang diterima koperasi dan anggota koperasi. Tahun lalu, 2016 kami menerima keuntungan sekitar Rp 4 miliar yang kemudian dibagi secara proposional ke seluruh anggota koperasi. Tahun ini kami menargetkan keuntungan sekitar Rp 4,5 sampai Rp 5 miliar, sehingga keuntungan yang akan diterima anggota koperasi pun ikut meningkat. Semoga kami bisa mencapai target tersebut,” ujarnya. ■

(Ayu), Foto: Eka/hr

Akbar Faizal Elza Syarief Beri Kesaksian Palsu

Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal menegaskan bahwa pengacara Elza Syarief diduga kuat telah memberi kesaksian palsu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor dalam kasus KTP elektronik (KTP-e). Kesaksian palsu itu dituding bagian dari skenario besar kliennya, M. Nazarudin untuk mencoreng nama baik Akbar.



Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal

Dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Selasa (29/8), Akbar menjelaskan, kesaksian palsu yang disampaikan Elza di hadapan pengadilan Tipikor adalah dirinya melakukan pertemuan dengan Miryam S. Haryani sekaligus menekan Miryam, agar tak memberi kesaksian yang merugikan. Akbar juga dituding Elza telah mengantarkan uang dengan jumlah tertentu dari Markus Nari kepada Miryam.

Kesaksian tersebut disampaikan Elza saat menjadi saksi, Senin (21/8) lalu di Pengadilan Tipikor. Mendengar kesaksian itu, Akbar telah melaporkan Elza ke Bareskrim Polri dengan tuduhan memberi kesaksian palsu. Sebelumnya, Akbar telah mensomasi Elza untuk mencabut kesaksiannya itu dalam waktu 3x24 jam. Namun, kesaksian tak digubris Elza, sehingga Akbar mengadukannya ke Bareskrim Polri.

“Kesaksian Saudari Elza Syraief adalah sesuatu yang tidak benar, karena Akbar Faizal tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan. Terlebih Miryam S. Haryani sendiri sebagai pihak yang Elza sebut sebagai pemberi informasi membantah kesaksian Elza di depan persidangan dan bahkan telah mencabut BAP-nya,” tulis Akbar dalam rilisnya.

Kesaksian Elza itu, nilai Akbar, ternyata hanya informasi yang didengar dari orang lain, bukan informasi yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Dalam hukum acara, kesaksian seperti itu sangat lemah. Elza sendiri, sambung Akbar, ragu-ragu dengan kesaksiannya itu, sehingga sempat merevisinya. Ini fitnah yang sempurna.

“Tindakan Elza ini saya fahami sebagai bagian dari skenario Nazaruddin untuk merusak kehormatan DPR dan orang per orang. Tapi, biarlah hal ini menjadi agenda Akbar Faizal berikutnya dengan Elza. Sebab, Akbar Faizal juga memiliki banyak informasi tentang Elza dalam hubungannya dalam relasi profesional sebagai pengacara dengan Nazaruddin,” ungkap Akbar dalam poin rilisnya.

Dasar hukum pengaduan Akbar atas Elza ke Bareskrim adalah kesaksian palsu seperti diatur Pasal 242 KUHP. Pemberian kesaksian tidak benar Pasal 22 UU/31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dan juga perbuatan fitnah Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP. ■

(mh,mp), Foto: Andri/hr

Ada Friksi Kelompok Penyidik di KPK

Desas desus adanya friksi (perpecahan) para penyidik di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibenarkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aries Budiman. Para penyidiknya terbelah menjadi dua kelompok besar. Ini mengindikasikan ada yang tak beres di internal KPK



Wakil Ketua Pansus KPK DPR, Masinton Pasaribu berjabat tangan dengan Dir. Penyidikan KPK Brigjen Pol. Aries Budiman.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus Hak Angket KPK DPR RI saat menghadirkan Aries, Selasa malam (30/8). Pimpinan dan para anggota Pansus mencecar berbagai pertanyaan kritis untuk mengungkap ketidakberesan penyidikan di KPK. Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu bertanya, apakah ada “gank” penyidik di KPK? Aries yang

tampil sendiri di Pansus, menjawab, tidak ada istilah gank itu. Yang ada, katanya, kesulitan tertentu dalam pelaksanaan tugas penyidikan di KPK.

Aries belum berani menyebut dengan jelas kesulitan apa yang dimaksud. Tapi setelah didesak, kesulitan yang dimaksud di antaranya soal rekrutmen penyidik Polri yang baru dengan pangkat ajun komisaris atau komisaris. Usulan Aries

untuk merekrut penyidik baru itu ditolak seniorinya di KPK, lantaran khawatir akan mengganggu kinerja KPK.

“Friksi tersebut berkaitan dengan perekrutan penyidik dari unsur polisi. Saya menginginkan dalam perekrutan penyidik dari unsur polisi, pangkatnya adalah ajun komisaris atau komisaris. Tapi ada pihak lain yang powerfull dan memengaruhi pembuatan sebuah kebijakan,” ungkap Aries di hadapan Pansus, tanpa mau menyebut nama sosok powerfull tersebut.

Anggota Pansus Junimart Girsang malah berani menyebut nama dan mengonfirmasinya kepada Aries. Ia mendesak Aries dengan bertanya, “Apakah itu seorang penyidik?” dijawab Aries, “Betul.” Junimart bertanya lagi, “Apakah Novel?” Aries pun akhirnya membenarkan. Sosok powerfull di KPK adalah penyidik senior KPK yang kini sedang mengobati matanya di Singapura, yaitu Novel Baswedan.

Di hadapan Pansus, Aries juga membantah semua tuduhan miring terhadapnya. Dia menegaskan tak pernah menerima uang suap Rp2 miliar dan tak pernah pula bertemu dengan anggota DPR RI. Pria asli Toraja tersebut mengaku, tak mengenal nama-nama anggota dewan dan bahkan ia tak pernah mau muncul di media.

Kehadirannya di rapat Pansus akhirnya merupakan penampilan pertamanya yang disorot media secara khusus. Para anggota Pansus pun baru kali itu mengenal wajah dan sosoknya. “Saya bisa jamin tidak pernah menerima uang Rp2 miliar,” aku Aries, seraya menambahkan bahwa tuduhan menerima uang itu telah menghancurkan reputasinya sebagai penyidik profesional. ■

(mh,mp), Foto: Iwan/hr

Komisi VI DPR Sorot Masalah Gula Nasional

Komisi VI DPR RI menyoroti permasalahan yang terjadi dalam tata niaga gula nasional, untuk itu Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPN III, VII, IX, X, XI, XII, PT. RNI, dan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Senin (28/8) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, adalah guna membahas masalah gula yang meliputi kualitas dan harga di pasar serta penyerapan gula petani.

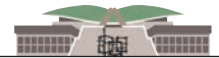
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat

Indonesia sehingga perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting, oleh karena itu perlu diawasi sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan,

Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga acuan pembelian gula dari petani sebesar Rp. 9.500 per kg dan harga acuan untuk konsumen sebesar Rp.12.500 per kg.

Pada bulan ini, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan gula



termasuk barang kebutuhan pokok tidak dikenai pajak penambahan nilai oleh karena merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, untuk perbaikan mutu gula Kristal Putih, dalam menjamin mutu dan keamanan pangan, meningkatkan nilai tambah daya saing, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan peraturan yang memberlakukan SNI secara wajib bagi perusahaan yang memproduksi atau yang mengimpor gula Kristal Putih.

Menurut informasi yang didapat Azam, terkait hal tersebut berkembang masalah bahwa pedagang enggan membeli gula petani karena pedagang khawatir dikenakan PPN dan di pasar banyak beredar gula baik yang berasal dari operasi pasar, maupun rembesan gula rafinasi, sehingga penyerapan gula petani di pasar sangat lambat.

Disamping itu, harga eceran tertinggi gula dibatasi Rp. 12.500 per kg, sehingga pedagang tidak berani menjual gula dengan harga diatas harga eceran tertinggi tersebut. Hal ini berakibat pedagang menekan harga gula petani bahkan harga petani hanya dihargai Rp.



Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana

1.500 per kg sehingga petani mengalami kerugian.

Selanjutnya, sebagai imbas banyaknya impor gula rafinasi yang tahun lalu mencapai 1,6 juta ton, padahal kekurangan kebutuhan hanya 400 ribu ton. Sehingga Pada akhir tahun sisa stok impor 1,2 juta ton.

Adapun, kebutuhan gula konsumsi tahun lalu sebesar 2,7 juta ton, dengan jumlah produksi 2,3 juta ton.

Petani tebu, saat ini dalam kondisi yang sangat sulit karena gula mereka tidak laku, informasinya, gula petani yang belum laku saat ini sebesar 250 ribu ton, sehingga mereka kesulitan modal untuk membiayai proses pengerjaan tanaman tebu usai ditebang pada waktu masa giling yang lalu.

"Bila permasalahan ini tidak cepat diselesaikan maka dikhawatirkan pabrik gula terancam berhenti menggiling," kata Azam Azman. ■

(as), Foto: Ojfe/hr

Pemerintah Jangan Persulit Petani Gula

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terkait penumpukan ribuan ton gula hasil petani nasional yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini semata demi kelangsungan hidup para petani gula.

“Penumpukan ribuan ton gula hasil petani yang terjadi di berbagai daerah harus segera disikapi serius oleh pemerintah. Regulasi yang dikeluarkan harus memudahkan dan menguntungkan petani. Selain mencabut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pemerintah juga harus memberi kelonggaran terkait SNI (standard nasional Indonesia). Pada prinsipnya gula bukanlah sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, kecuali bagi pengidap penyakit gula. Karena itu, pemberian label SNI harus lebih fleksibel,” ujar Edhy Prabowo dalam siaran persnya di Jakarta, baru-baru ini.

Jangan hanya karena warna gula sedikit kuning, lanjut Edhy, langsung dinyatakan tidak SNI dan pabriknya langsung ditutup. Pemerintah perlu arif dan bijaksana, dimana rata-rata pabrik milik petani sudah berusia tua dan kalah oleh pihak swasta yang peralatannya jauh lebih modern. Pemerintah seharusnya mengajak diskusi dan memberikan edukasi kepada petani, bukannya langsung mengeksekusi.

Bahkan, politisi dari fraksi Partai Gerindra ini menilai pemerintah juga harus memiliki neraca kebutuhan gula yang tepat dan jelas agar dapat memprediksi kebutuhan gula dan menjaga stabilitas harga. Gula hasil petani pun harus disesuaikan harganya agar dapat bersaing dengan gula impor.

“Sangat ironis bila gula hasil impor dapat laku di pasaran, sementara gula hasil petani kita sendiri tak laku dan menumpuk di gudang. Apalagi ada dugaan gula impor sudah menyasar konsumen gula petani. Kalau kondisinya terus menerus seperti ini lebih baik pemerintah jangan melakukan impor gula sebelum gula dari petani lokal laku di pasaran, baik untuk sektor industri hingga kebutuhan rumahan,” ungkapnya.

Edhy meminta Pemerintah harus pro kepada rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus memikirkan hajat hidup petani. Kalau terus menerus petani gula merasakan hal seperti ini, bisa berdampak tidak produktifnya petani gula, ekenomi dan daya beli petani menjadi lemah, serta berpeluang menambah angka kemiskinan.

Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji akan membangun 10 pabrik gula baru saat kampanye lalu. Sampai saat ini jangankan satu pabrik tercipta, pabrik yang lama saja tidak diperhatikan, dan hajat hidup petani gula semakin tertekan karena kesulitan dalam pemasaran.

“Sekali lagi, penguasa harus berpihak kepada kaum tani. Fraksi Kami (Gerindra) akan tetap mengawal hajat hidup para petani. Karena Gerindra lahir dan berdiri, salah satunya karena dukungan kaum tani,” tegasnya. ■



Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo

(Ayu,mp), Foto: Kresno/hr

Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Cukup di Tingkat Pusat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, Komisi II berkeyakinan kuota 30 persen keterwakilan pengurus perempuan partai politik hanya sampai di tingkat pusat. Pasalnya jika KPU tetap mengatur dalam PKPU 30 persen keterwakilan hingga di daerah jelas itu melanggar Undang-Undang.



Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy

“Kuota 30 persen Keterwakilan perempuan di daerah berat dilakukan, terlebih PKPU itu juga melebihi undang-undang,” Jelas Lukman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu mengenai Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8)

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR Sirmadji yang menilai agar 30 persen keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat saja. Namun di daerah tetap memperhatikan keterwakilan perempuan agar partisipasi semakin tinggi.

“Peraturan 30 persen keterwakilan perempuan cukup menjadi perhatian di daerah saja tidak usah diwajibkan. Kalau diwajibkan terus tidak terealisasi bisa tidak boleh ikut dong berarti. Makanya cukup menjadi perhatian saja,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menilai partai politik mampu memenuhi ketentuan kepengurusan 30 persen perempuan sampai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam setiap kepengurusan parpol di daerah penting dan menjadi semangat KPU.

“Kami meyakini parpol mampu melakukan itu (30 persen pengurus perempuan di daerah). Itu semangat kita bersama menjadi afirmasi keterwakilan perempuan di partai politik,” ujar Arief. ■

(rmm/sc), Foto: Jayadi/hr



Anak-anak usia TK hingga SD terlihat ceria dan antusias mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Gedung DPR RI jadi objek gambar para peserta. Inilah lomba menggambar dan mewarnai yang digelar Korpri Setjen DPR RI.



Korpri DPR Gelar Lomba Menggambar dan Mewarnai

Kepala BKD DPR, Johnson Rajagukguk membuka acara lomba menggambar dan mewarnai dalam rangka HUT DPR ke 72

Minggu pagi (27/8), Gedung Nusantara III begitu ramai dengan para peserta anak-anak. Mereka didampingi orangtua masing-masing. Duduk sepanjang lobi Nusantara III, para peserta terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok A adalah peserta usia TK. Kelompok B mereka yang duduk di kelas I hingga III SD. Sementara kelompok C mereka yang sudah duduk di kelas IV hingga VI SD.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, lomba

kali ini selain menjadi rangkaian dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, juga untuk memperingati HUT DPR RI ke-72 tahun. Ini adalah kegiatan yang rutin diadakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR setiap kali menyambut kemerdekaan dan ulang tahun DPR.

Johnson berharap, tahun depan bisa lebih banyak lagi menggelar lomba agar semakin semarak. Dengan menggelar lomba menggambar dan mewarnai, ada semangat perjuangan yang coba diwarisi sejak dini kepada anak-anak. "Dengan melukis gedung DPR, nanti anak-anak

akan bertanya ada apa di dalam gedung tersebut. Suatu saat nanti tidak hanya tahu, tapi mungkin ada yang menjadi anggota atau pegawai DPR RI," ujarnya usai membuka acara.

Dan yang terpenting lagi, sambung Johnson, anak-anak bisa memahami sejarah perjuangan bangsanya sekaligus sejarah DPR yang menjadi objek gambar. Ada beragam hadiah yang sudah tersedia bagi para pemenang. Sepeda, piala, piagam, hingga tabung tersedia bagi para pemenang. ■

(mh.sc), Foto: Arief/hr

RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel

Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum mengarah pada perbaikan, sayangnya daya pacu ekonomi domestik masih belum optimal. Kelas menengah atas memilih saving dibanding spending, sedangkan masyarakat bawah masih tertekan daya belinya. Belum terlihat arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang meyakinkan dari RAPBN 2018,” ujarnya kepada media di Jakarta, Senin (28/8).

Di sisi lain Ecky juga mengingatkan target-target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan turunan dari janji-janji politik selama masa kampanye. “RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Khusus tahun 2018, bahkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan 7,4 persen seharusnya. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengatasi problem tingkat pengangguran yang masih tinggi dan agar dapat keluar dari middle income trap sehingga dapat menjadi negara maju. Namun sayangnya kapasitas kebijakan pemerintah belum mampu menuju kesana. Sehingga pemerintah hanya menyampaikan target tersebut. Dan ini sangat tidak memuaskan sebenarnya,” tandasnya.

Ecky juga memberikan catatan bahwa target pertumbuhan ekonomi fantastis yang dijanjikan selama ini gagal dipenuhi oleh pemerintah. Pada APBN-P 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen dan hanya terealisasi 4,8 persen. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya 5,02 persen, meleset dari target 5,2 persen.

“Dengan kapasitas yang terbatas, pilihan yang paling mungkin akhirnya adalah pemerintah harus mau menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan lebih memprioritaskan

kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia. Targetnya harus mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan menjadi pertimbangan utama dalam politik anggaran APBN 2018,” imbuhnya.

Ecky memaparkan bahwa pencapaian pertumbuhan Semester I 2017 yang baru menyentuh 5,01 persen menjadi warning tidak tercapainya target pertumbuhan 5,2 persen yang ditetapkan untuk tahun 2017. Sebagaimana telah dirilis BPS angka pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2017 hanya sebesar 5,01 persen. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi Kuartal I 2017, dan jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2016 yang mencapai 5,18 persen.

“Stagnasi tersebut tentu akan berdampak pada target pertumbuhan selanjutnya pada 2018. Oleh karenanya target pertumbuhan ke depan seperti ini harus lebih moderat agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. Revisi ke bawah bukan hanya mempengaruhi anggaran serta pencapaian target, tetapi juga kredibilitas pemerintah,” tegasnya.

Ecky menekankan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi,

terutama yang berorientasi pada pemberdayaan sektor riil dan peningkatan daya beli rakyat. Hal ini menurutnya karena mesin pertumbuhan masih tetap akan bergantung pada belanja rumah tangga.

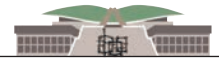
“Namun sayangnya belum terlihat kebijakan yang komprehensif dari pemerintah untuk mendorong peningkatan daya beli rumah tangga, sehingga dapat memacu demand side secara signifikan. Paket-paket kebijakan yang sudah banyak diterbitkan juga baru menyentuh upaya mendorong supply side dan belum berdampak signifikan,” paparnya lebih lanjut.

Ecky juga memberikan sejumlah catatan pelaksanaan APBN selama ini yang harus menjadi masukan penting dalam pembahasan RAPBN 2018 kedepan. “Kita melihat bahwa peran stimulan fiskal pemerintah selama ini untuk mendorong perekonomian dan pembangunan belum optimal. Hal ini misalnya dapat dilihat dari realisasi belanja negara yang hanya mencapai 89,5 persen dari pagu APBNP tahun 2016 atau sebesar Rp 1.884 triliun. Angka realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada APBNP 2015 yang mencapai 91,05 persen dari pagu APBNP tahun 2015 atau sebesar Rp1.806,5 triliun, dan menurun dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 94,69 persen. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti realisasi belanja modal yang mengalami penurunan tajam. Belanja modal 2016 yaitu hanya sebesar Rp 169 triliun, jauh apabila dibandingkan tahun 2015 yang



Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam



sebesar Rp 215 triliun. Realisasi belanja modal pada tahun 2016 secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp 46 triliun, dan hanya terealisasi 80 persen. Angka realisasi belanja modal pada periode ini lebih rendah dibandingkan pada periode Pemerintahan sebelumnya. Pada periode 2009-2014, rata-rata

pertumbuhan belanja modal Pemerintah setiap tahun mencapai 14,2 persen. Sedangkan pada periode 2014-2016 hanya tumbuh 2,1 persen setiap tahun. Terutama tahun 2016 menjadi catatan karena realisasi belanja modal mengalami pertumbuhan negatif 21 persen.

“Belanja modal sesungguhnya

sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing. Realisasi belanja negara dan belanja modal yang kurang optimal tentu menghambat pembangunan serta pencapaian pertumbuhan yang lebih baik. Juga penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,” tutup Ecky. ■

(sc) Foto: Andri/hr

Pemerintah Daerah Tak Boleh Abai pada Pelayanan Kesehatan

Sudah enam bulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemkot Samarinda belum menerbitkan izin operasional untuk Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda. Akibat dari itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik, bahkan banyak pasien yang terlantar karena pemerintah daerah tidak memberikan kejelasan pada izin operasional rumah sakit tersebut. Komisi IX DPR RI menghendaki pelayanan kesehatan di setiap daerah berjalan dengan baik, oleh sebab itu pemerintah daerah tidak boleh abai pada permasalahan pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri berusaha mencari titik temu permasalahan, agar ketersendatan pelayanan kesehatan tidak berlarut-larut. “Oleh karena itu kami akan memediasi kami akan panggil pihak-pihak terkait di sana, dari pemerintah provinsi, dari Pemerintah Kota Samarinda dan juga pihak yayasan untuk mencari titik temu, sehingga operasionalisasi rumah sakit ini tidak terganggu dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” jelas Syamsul di ruang rapat Komisi IX, Nusantara I, Senin (28/8).

Persoalan RSI ini memuncak saat terjadi pengambilalihan pengelolaan RSI dari Yarsi ke RSUD AW Syahrani milik Pemprov Kaltim. Masalah bermula dari terbitnya SK Gubernur Kaltim tentang Pencabutan penggunaan lahan dan bangunan Juli lalu sehingga RSI otomatis kehilangan lahan dan bangunan yang memaksa pengelolaannya berada di bawah manajemen AW Syahrani yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kaltim.

Memorandum of Understanding (MoU) peralihan pun diteken pada 3 Agustus. Lima hari kemudian, Pemprov Kaltim memasang papan nama baru RSI, yakni RSUD Islam Klas C AW Sjahrani. Saat itulah, langkah Pemprov Kaltim mulai mendapat ganjalan, karena pengurus Yarsi menolak dengan alasan belum ada surat perjanjian kerja



Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri

bersama (SPKB). Sementara itu, pemprov menyatakan, MoU sudah mencakup kerja sama itu. Inilah awal mengemuka perseteruan antara pihak pemprov dan Yarsi.

Syamsul yang memimpin rapat merasa prihatin dengan aduan yang disampaikan oleh pihak RSI Samarinda, namun ini baru pengakuan dari satu pihak. Komisi IX masih memerlukan keterangan dari pemerintah daerah. Jika apa yang diungkapkan oleh Jajaran Direksi dan Manajemen RSI Samarinda dan juga Direktur RSI, Sadik Sahil benar, maka Syamsul sangat kecewa dengan perlakuan pemda.

“Jika apa yang dilaporkan pihak direksi rumah sakit itu betul, tentu kami sangat kecewa, tentu kami sangat prihatin,” ujar Syamsul.

Pasalnya masalah ini sangat berdampak

pada hajat hidup orang banyak, layanan kesehatan publik terganggu. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, juga pada karyawan dan tenaga kesehatan rumah sakit mandek.

Bahkan Pansus DPRD Kaltim yang mengatasi masalah RSI merekomendasikan agar Pemprov Kaltim memberikan izin pemakaian lahan kepada Yarsi sesuai kewenangan PP 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Daerah agar pelayanan kepada masyarakat di Samarinda tidak terganggu. Pansus, juga meminta Pemkot Samarinda untuk segera melakukan proses perpanjangan izin operasional kepada pihak Yarsi.

Di saat yang sama Komisi IX DPR RI juga menerima audiensi dari dua rumah sakit lain, RSUD Kabupaten Bintan Riau, dan Forum Karyawan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Syamsul menjelaskan ketiga rumah sakit tersebut titik permasalahannya adalah sengketa. RSI Samarinda sengketa dengan pemda, RSUD Kabupaten Bintan Riau dengan PT Antam, sedangkan Forum Karyawan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan pemda setempat.

Syamsul menyarankan, intinya semua pihak yang bersengketa bisa berunding dengan bijaksana sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terabaikan. “Saya kira masing-masing pihak bisa berunding, untuk mencari jalan yang terbaik. Sehingga posisi rumah sakit itu bisa berfungsi dengan baik,” paparnya. ■

(eko,mp). Foto: Rumi/hr

Jalan Lintas Selatan Buka Potensi Ekonomi Baru

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo berharap Jalan Lintas Selatan (JLS) segera rampung karena akan membuka potensi ekonomi baru bagi warga setempat.



Tim Kunspek Komisi V DPR memantau infrastruktur jalan di Pantai Gemah, Kabupaten Tulungagung

“Jalan-jalan itu membuka daerah-daerah terisolir dan ternyata hebatnya dari daerah terisolir itu membuka tempat wisata baru dan berpotensi menambah ekonomi masyarakat seperti Pantai Gemah ini,” ungkap Sigit saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (24/8).

Pantai Gemah, sambungnya

merupakan tempat wisata baru setelah dibukanya akses JLS (Tulungagung - Trenggalek). Sejak dibuka, Pantai Gemah telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 420 juta / 3 bulan. Sehingga, bila pembangunan JLS dituntaskan, tidak menutup kemungkinan akan muncul pantai-pantai Gemah lainnya.

“Kata pak Bupati tadi sepanjang JLS

Tulungagung ini akan membuka 10 bahkan lebih tempat destinasi baru. Kalau dikelola dengan baik akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang baru,” jelasnya.

Masih diungkapkan Sigit, banyak kajian yang menunjukkan destinasi wisata mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, apabila dikelola dengan baik.

Karena itu, politisi PKS ini komitmen akan mendorong pembangunan JLS yang menghubungkan delapan daerah di wilayah selatan untuk segera rampung. Walaupun tidak menutup kemungkinan, pembangunan JLS akan tersendat karena kondisi keuangan negara yang kurang bersahabat. Seperti trayek JLS (Tulungagung-Trenggalek) yang masih menyisakan 34,35 Km dari total panjang 55,1 Km.

“Mudah-mudahan program JLS ini tetap berlanjut seperti yang kita targetkan dalam RPJMN. Tahun 2019 kan semestinya sudah nyambung sampai Malang tapi kondisi keuangan kita seperti ini, minimal Tulungagung-Trenggalek atau Blitar bisa terhubung,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, JLS adalah salah satu proyek strategis nasional yang akan menghubungkan delapan daerah di wilayah selatan Jawa Timur. Mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

Selain meninjau JLS, Tim Kunjungan Kerja Komisi V juga berkunjung ke beberapa tempat, antara lain: Jembatan Mergayu, Embung Nglampir dan Jalan Lingkar Timur (JLT). ■

(arni/sc) foto: Anne/hr

BSSN Harus Diisi Personel yang Mumpuni

Pemerintah tengah mempersiapkan struktur organisasi maupun tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang ditenggat selesai pada September 2017 mendatang. Mengingat pentingnya badan yang dibentuk dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 itu, diharapkan personelnya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang siber dan sandi.

“Dalam rancangan itu, tentu kita menghendaki orang-orang yang mempunyai kemampuan yang mumpuni dan memahami betul dunia siber, dan bagaimana melakukan pengamanan dunia siber,” kata Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pereira di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Politisi F-PDI Perjuangan itu mengingatkan, personil itu merupakan representasi negara dalam menjaga lalu lintas dunia siber atau dunia maya. Pasalnya, keamanan dunia siber merupakan kedaulatan bangsa yang juga harus dijaga. Sehingga diperlukan segenap kemampuan negara dalam menjaga stabilitas komunikasi dan informasi di masyarakat, yang beredar di dunia maya.

“Kita juga perlu belajar dari kasus negara-negara yang mempunyai kecanggihan alat dan teknologi yang bisa melakukan pengawasan terhadap dunia maya. Tentu tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, tapi kita bisa mencontoh negara itu, seperti Tiongkok misalnya,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon



Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira

(F-Hanura) mengingatkan pemerintah dalam menyelesaikan struktur organisasi maupun pengalihan peralatan ke BSSN untuk tidak terlalu berdekatan dengan Pilpres ataupun Pileg 2019.

“Kita ingatkan jangan terlalu mepet dengan Pilpres ataupun Pileg pada tahun 2019. Karena kita tahu, perang siber telah menjadi musuh kita bersama yang dapat melumpuhkan sendi-sendi ketahanan bangsa. Perang siber dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan Pilpres atau Pileg,” pesan politisi asal dapil Sumut itu.

Menkominfo Rudiantara pun memastikan, penyusunan organisasi dan tata kerja BSSN akan selesai pada September 2017 mendatang. Sementara untuk pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dan lainnya ditargetkan selesai pada Mei 2018.

Rudiantara menambahkan, pegawai di Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo diberikan pilihan untuk dapat pindah ke BSSN. Perpindahan akan dilakukan setelah BSSN menetapkan pemetaan jabatan dan kualifikasinya. ■

(sf/mp), Foto: Azka/hr

Setiap Lembaga Negara Harus Junjung Tinggi *Check and Balances*

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, tidak boleh ada sebuah lembaga negara yang super, atau yang merasa posisinya lebih tinggi dari lembaga-lembaga negara lainnya. Artinya setiap lembaga negara harus menjunjung tinggi prinsip *check and balances*.

Hal itu ditegaskannya saat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Senin (28/8).

Politisi Golkar dari Jabar ini menyebutkan, acara RDPU kali ini sebagai hari yang sangat bersejarah bukan buat Pansus, tapi bagi negara dan bangsa untuk perbaikan tata kelola hubungan antar lembaga negara dalam penegakan hukum kasus korupsi.

“Saya katakan bersejarah, penegakan hukum akan berjalan tanpa adanya tipu menipu atau rekayasa ketika institusi yang menjalankan penegakan hukum itu bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga berikutnya. Sehingga tidak terjadi fragmentasi yang dilakukan oleh unsur penegakan hukum dalam konteks *criminal justice system*,” tandasnya.

Menurutnya, kekuasaan penyidik dan penyidik bisa dikontrol oleh kejaksaan dan kekuasaan itu bisa digelar sidang pengadilan. Dan ketika keputusan sudah *inkrach* maka menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan. Tidak boleh ada lembaga pemerintah yang menjalankan kewenangannya tanpa mandate perintah undang-undang.

Agun menegaskan, selalu saja opini seolah Pansus Angket KPK ini akan memburu, melemahkan KPK. Padahal KPK ini hanya salah satu lembaga negara dalam pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif, tanpa bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

“Itu intinya. Perlu tidak revisi UU KPK, ya jawab sendiri. Jawaban itulah yang nanti akan kami berikan,” tambahnya.

Filosofi dasar reformasi, lanjut Agun, adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Oleh karena itu konsekuensi negara hukum dan



Ketua Pansus KPK DPR, Agun Gunandjar Sudarsa

demokrasi adalah pengarusutamakan mengutamakan kemajuan hak asasi. Dalam konsep demokrasi mutakhir dan modern maka harus mewujudkan *check and balances*. ■

(mp), Foto: Iwan/hr

Perlindungan Saksi Harus Dikoordinasikan dengan LPSK

Setiap perlindungan saksi dan korban harus dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengamanatkan hanya LPSK yang berhak memberi perlindungan sekaligus mengelola rumah aman.



Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai

Demikian penjelasan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, sesaat sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Senin (28/8/2017). Penjelasan Haris tersebut terkait dengan kontroversi KPK yang mengelola sendiri rumah aman untuk melindungi saksi dan justice collaborator (JC). Perlindungan saksi dan JC selama ini tidak hanya datang dari saksi sendiri, tapi juga rekomendasi KPK kepada LPSK.

“Hak saksi untuk ditempatkan di rumah aman dan LPSK yang diberi kewenangan mengelola rumah aman, bukan institusi lain berdasarkan UU tersebut. Kalau ternyata ada institusi lain yang mengacu pada aturan yang berbeda, silakan saja,” kata Haris. Pengelolaan rumah aman secara

eksplisit disebut dalam UU No.31/2017. Ia mengaku belum menemukan UU lain yang memberi kewenangan pada institusi lain untuk melindungi saksi dan mengelola rumah aman.

Namun, ketika didesak apakah KPK berhak mengelola rumah aman, Haris menjawab, tidak dalam kapasitasnya mengomentari hal itu. KPK, katanya, mungkin punya pemahaman dan dasar hukum lain. “Kami tidak menyebut KPK tidak berwenang. Bisa saja dalam penerjemahan UU, KPK punya pandangan lain. Itu haknya institusi tersebut,” akunya lagi.

Rumah aman, sambung Haris, sifatnya independen. Rumah aman tersebut dikelola sesuai aturan internal LPSK. Haris mengaku baru belakangan mengetahui ada rumah aman yang dikelola KPK. Tentu tak ada koordinasi dengan LPSK, bila KPK punya rumah aman sendiri. Hanya saja ia berharap, setiap upaya perlindungan saksi hendaknya dikoordinasikan dengan LPSK.

Ditambahkan Haris, idealnya sebuah institusi penegak hukum yang punya kewenangan penyidikan harus dipisah kewenangannya dalam melindungi saksi dan korban. Di sinilah pentingnya pembentukan LPSK. Praktik di beberapa negara selalu dipisah antara kewenangan penyidikan dan kewenangan perlindungan saksi. ■

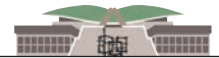
(mh,mp), Foto: Iwan/hr

Tak Ada Tanah dan Bangunan Hasil Tipikor di Rupbasan Jakarta

Pansus Hak Angket KPK DPR RI mendapatkan data penting dari Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa tak ada barang sitaan berupa tanah dan bangunan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) wilayah Jakarta dari hasil penanganan kasus korupsi oleh KPK.



Ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar Sudarsa berjabat tangan dengan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham



Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus dengan Dirjen Pemasyarakatan, Direktur Rupbasan, dan para Kepala Rupbasan se-Jakarta, Selasa (29/8). Barang sitaan berupa tanah dan bangunan pernah disampaikan Yulianis kepada Pansus beberapa waktu lalu. Ketika itu, dia menyampaikan ada tanah dan bangunan milik Nazaruddin di Jl. Warung Buncit yang sudah disita KPK. Namun, begitu dikonfirmasi kepada Kepala Rupbasan Jakarta Selatan, tidak ada barang sitaan yang dimaksud.

Setidaknya ada enam gedung milik Nazaruddin yang disita KPK berdasarkan kesaksian Yulianis, tapi tidak ada di Rupbasan. Yang ada seperti diungkap para Kepala Rupbasan hanya kendaraan bermotor. Pansus pun mempertanyakan, ke mana semua aset sitaan tersebut hasil

penanganan kasus tipikor Nazaruddin. “Ini bukti bahwa KPK tidak berkoordinasi dengan Rupbasan. Padahal, sudah ada kerja sama semua institusi terkait untuk mengelola barang sitaan dan rampasan,” kata Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa.

Masing-masing Kepala Rupbasan membacakan barang-barang yang tercatat di hadapan Pansus. Rupbasan Jakarta Selatan, misalnya, ada 66 unit mobil milik narapidana tipikor Tubagus Chaeri Wardana. Ada juga kendaraan sitaan milik Akil Mochtar, Fuad Amin, dan Joko Susilo. Di Rupbasan Jakarta Barat ada kendaraan milik Nazaruddin yang disita, tapi bukan tanah dan bangunan. Di Rupbasan ini juga ada juga kendaraan milik Lutfi Hasan, Fatonah, dan Damayanti.

Di Rupbasan Jakarta Pusat ada 55

unit kendaraan dan mesin. Sebagian besar milik Tubagus Chaeri Wardana. Di Rupbasan Jakarta Utara ada 14 unit mobil. Sementara di Rupbasan Jakarta Timur hanya ada 30 motor yang disita dari Akil Mockhtar. Tidak ada tanah, bangunan, atau barang berharga lainnya di sini.

Para Kepala Rupbasan juga mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan barang-barang sitaan dan rampasan sangat minim. Rupbasan Jaksel, misalnya, hanya memiliki alokasi anggaran Rp 20 juta per tahun untuk biaya pemeliharaan. KPK sendiri yang menitipkan barang-barangnya di Rupbasan hanya memberi Rp 200 - Rp 300 ribu per bulan. Dikhawatirkan barang-barang yang sudah dirampas untuk negara tidak bisa dilelang, karena tak terawat. Akhirnya negara pun dirugikan. ■

(mh/sc), Foto: Iwan/hr

DPR Aktif Kawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Parlemen sebagai lembaga legislatif mempunyai peranan penting dalam mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif parlemen.



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang yang akan dihadiri 45 negara dari seluruh benua ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI. Karena sejak dideklarasikan komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan, atas inisiasi DPR, ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sidang tersebut akan terbagi dalam 3 sesi pembahasan, yakni: Leave no One Behind, sesi ini akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian Sesi ke-dua akan mengangkat topik Ending Violence Sustaining Peace, bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.

Terakhir pada sesi ke-tiga akan membahas mengenai SDG's dan Climate

Action, melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.

Menurut Nurhayati, nantinya outcome dari Sidang di Bali akan menghasilkan Bali Declaration dan besar harapannya World Parliamentary Forum akan terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia.

“Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah dalam pencapaian agenda 2030,” sambungnya.

Sementara itu, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi mengapresiasi diadakannya forum ini. Menurutnya, parlemen sebagai pemilik political push di berbagai bidang berperan penting untuk mendorong pemerintah melaksanakan SDG's. Selain itu diplomasi parlemen dalam mem-push pelaksanaan SDG's akan membangun kemitraan internasional.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta agar DPR RI aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan dewan keamanan PBB pada tahun 2018. Menurutnya, forum tersebut tepat untuk mempromosikan Indonesia.

“Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kita promosi atau kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap keamanan PBB,” ucapnya. ■

(ann/sc), Foto: Arnel/hr



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha (kedua dari kiri) berdialog dengan sejumlah Anggota Komisi VII DPR

Freeport Harus Tunduk Hasil Renegosiasi

Hasil kesepakatan renegotiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus dijadikan momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan final renegotiasi adalah kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil renegotiasi final tersebut. Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting antara pemerintah dan Freeport tersebut dilaksanakan secara konsisten.

“Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegotiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport,” tegas Satya usai Rapat Paripurna HUT DPR RI ke-72, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (29/8). Politisi F-PG itu juga mendorong

kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional dalam penguasaan saham divestasi Freeport tersebut. Sehingga, kata Satya, ke depan sudah tidak ada lagi istilah ‘dikuasai asing’ dalam pengelolaan PTFI.

“Divestasi saham PTFI sebesar 51 persen menjadi cerminan bahwa sudah saatnya BUMN maupun swasta nasional mengambil peran yang cukup signifikan. Kita dorong pemerintah untuk memberi kesempatan bagi BUMN dan swasta nasional. Seharusnya BUMN dan swasta nasional sanggup,” dorong Satya.

Terkait perpanjangan kontrak yang diberikan kepada PTFI yaitu

2x10 tahun hingga tahun 2041 seperti dalam kesepakatan renegotiasi, Satya mengungkapkan, tidak serta merta bahwa perpanjangan masa operasi tersebut dikabulkan oleh pemerintah. Apalagi jika PTFI tidak patuh untuk merealisasikan poin-poin penting dalam kesepakatan renegotiasi.

“Tidak serta merta perpanjangan diberikan pemerintah begitu saja, asalkan Freeport benar-benar berpegang pada komitmennya terhadap poin-poin hasil final renegotiasi dengan pemerintah,” tutup politisi asal dapil Jatim itu.

Sebagaimana diketahui, hasil kesepakatan final renegotiasi pemerintah dengan PTFI menghasilkan empat poin penting. Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PTFI adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK). Kedua, divestasi PTFI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, PTFI berkewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022. Dan keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. ■

(s/rmp). Foto: Andri/hr



Tim Kunspek Komisi X DPR Sosialisasikan UU tentang Sistem Perbukuan di Jawa Tengah

UU Sistem Perbukuan Ciptakan Buku Mutu Murah dan Merata

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra melakukan Kunspek terkait sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sistem Perbukuan. Pertemuan yang membahas gerakan 3M yaitu penyediaan buku yang Mutu, Murah, dan Merata dalam proses pembelajaran ke Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam acara ini Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Bupati Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Semarang, Kendal, dan Demak, serta perwakilan penulis dan penerbit di Jawa Tengah.

Menurut Sutan, jika bangsa adalah sebuah tubuh, maka pengetahuan dalam pengertiannya yang paling luas adalah oksigen yang menentukan kesehatan dan keutuhan bangsa tersebut. Salah satu cara mendapatkan pengetahuan adalah dengan membaca buku. “Jika kita berbicara buku, buku adalah sumber ilmu berarti kita memiliki pandangan buku merupakan senjata SDM kita, jika kita terus membaca kita akan memiliki intelektual dan SDM yang berkelanjutan,” tutur SAH panggilan

akrab Pimpinan Komisi X ini, di Semarang, Senin (28/8).

Politisi senior dan juga anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjungan yang turut serta dalam kunjungan tersebut, menuturkan dengan adanya UU Sistem Perbukuan maka orang tidak seandainya menulis tapi harus terfokus kepada sistem pendidikan Pancasila, dan tidak boleh keluar dari garis-garis tersebut. “Dengan adanya UU Sistem Perbukuan yang paling penting adalah buku teks utama yang berlaku di sekolah-sekolah adalah gratis sehingga tidak memberatkan orangtua

“Jika kita berbicara buku, buku adalah sumber ilmu berarti kita memiliki pandangan buku merupakan senjata SDM kita, jika kita terus membaca kita akan memiliki intelektual dan SDM yang berkelanjutan”

siswa,” tutur Popong.

Dia juga menyoroti sistem pendidikan Indonesia yang relatif tertinggal dibanding negara yang baru merdeka, sitem pendidikan Indonesia sering berubah-ubah ketika ganti menteri maka ganti juga sistem pendidikannya.

Penerbit buku di wilayah Semarang juga sangat mengapresiasi terbitnya UU Sistem Perbukuan yang akan menciptakan buku yang mutu, murah dan merata. “Saya menyambut baik dengan kunjungan Komisi X ke Semarang, saya harap dengan kunjungan ini dapat meningkatkan gairah penerbit-penerbit di daerah ini untuk ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur penerbit Aneka Ilmu Suwanto.

Ketua Tim Kunspek Sutan Adil Hendra sangat mengapresiasi upaya Penerbit Airlangga yang ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan siswa-siswi dengan cara meluncurkan gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah dapat menjangkau wilayah terpencil karena penerbit berkunjung ke sekolah dan memberikan buku bacaan gratis untuk meningkatkan minat baca anak-anak.

Ikut serta dalam Kunspek ini anggota Komisi X DPR RI Wayan Koster, Sofyan Tan, Ridwan Hisjam, Nuroji, Iwan Kurniawan, Amran, SY Anas Tahir, Anwar Idris, dan Yayuk Sri Rahayu. ■



Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR, Hamka Haq bersalaman dengan Tenaga Pendamping PKH di Semarang

PKH Harus Mampu Sejahterakan Masyarakat

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karenanya, Komisi VIII melakukan pengawasan ke Semarang untuk melihat implementasi dari program tersebut.

“Tujuan PKH adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni mengubah perilaku dan mengubah kecakapan SDM,” ujar Hamka, Senin (28/8) di Semarang.

Politisi PDIP ini mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemprov Jateng agar pelaksanaannya dapat optimal. “Kami ingin mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemprov Jateng lewat Kadis Provinsi dan Kota,” ujarnya.

Sehingga PKH diharapkan dapat tersalurkan dengan baik sampai di tingkat keluarga. Komisi VIII juga berkesempatan

mengunjungi e-warung yang berada di Semarang yang didanai oleh PKH.

Hamka berharap pembangunan e-warung dapat ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat di daerah. Saat ini sudah ada 56 e-warung di Indonesia dan tahun depan akan diperbanyak lagi.

“Tahun ini akan dibentuk 56 e-warung se-Indonesia. Tahun depan meningkat menjadi 100. Mudah-mudahan e-warung menjadi lebih berkembang lagi,” terang Hamka.

Selain itu, Hamka juga menyoroti banyaknya kartu yang digunakan dalam proses pembayaran e-warung sehingga

ini sedikit menyulitkan transaksi. Karenanya ia meminta agar dilakukan sinergitas dalam satu kartu.

“Pemerintah punya rencana untuk menyatukan macam-macam kartu menjadi cukup satu kartu saja. Jadi semoga dapat terwujud,” terang Hamka.

Kepala Dinas Sosial Pemprov Jateng Tommy Yarmawan mengapresiasi langkah kunjungan Komisi VIII ke Jateng ini. Ia berharap akan terus menjalin sinergitas dengan DPR dalam upaya menjalankan programnya. “Kita berharap untuk terus membangun sinergi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Tommy. ■

(hs), Foto: Hendra/hr



Akurasi Data Kependudukan Dorong PKH Tepat Sasaran

Pengakurasi data kependudukan menjadi salah satu aspek yang mendorong Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat menjadi tepat sasaran. Oleh karena itu Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati mengharapkan Lampung bisa menjadi provinsi pertama yang menerapkan keakuratan data penduduk sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi lain.

“Pendataan penduduk merupakan persoalan utama yang selalu menjadi sorotan. Karena jika tidak tepat, hal ini bisa berpengaruh pada rencana anggaran dan kebijakan. Oleh karena itu saya berharap *comprehensive data evacuation* bisa dilakukan di Lampung agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Sosial Lampung dalam rangka peninjauan terkait pelaksanaan PKH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Senin (28/8).

Politisi asal dapil Lampung ini menyarankan terkait pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS, turut dibantu oleh RT/RW setempat. Sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

“Pendataan itu terus terang amburadul. Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut, bukan dilakukan dalam bentuk sweeping melainkan survey. Survey tersebut tidak dilakukan satu persatu individu sehingga hasilnya kurang tepat. Alangkah baiknya jika RT/RW setempat juga dilibatkan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil

Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan setuju untuk melibatkan perangkat lain dalam pendataan penduduk, dan berharap ke depan pemerintah dapat terus memperbaiki hal ini.

“Untuk memperoleh data yang lebih akurat, ke depan, BPS akan melibatkan perangkat daerah lain seperti RT/RW atau kepala dusun karena mereka inilah yang lebih mengerti daerahnya sehingga bisa meminimalisir kesalahan, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Bachtiar.

Lebih lanjut Bachtiar menyampaikan penyaluran PKH di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 telah mencapai Rp 1,281 triliun lebih, dengan jumlah penerima PKH pada tahap 3 tahun 2017 berjumlah 217.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).■

(tra.mp), Foto: Tjara/hr



Tim Kunspek Komisi VIII DPR meninjau pelaksanaan program PKH di Provinsi Lampung

Buka Warna-Warni Parlemen, Kerja Sama DPR dan Media Diharapkan Semakin Baik





Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Pameran Foto Jurnalistik “Warna-Warni Parlemen” ke-6 yang diselenggarakan oleh Wartawan Foto Parlemen yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, Selasa (29/8).

Pameran foto tersebut merupakan serangkaian acara peringatan HUT DPR RI ke 72 dengan tema “Membangun DPR Modern Melalui Kerja Bersama”. Pameran berlokasi di Lobi Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 29 Agustus – 5 September 2017.

“Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi rekan-rekan media menyampaikan informasi positif yang patut diapresiasi. Seperti kata pepatah, satu foto seribu kata, jadi banyak sekali pesan yang bisa diungkapkan dari fotografi hasil karya jepretan wartawan parlemen,” ujar Fadli Zon saat membuka pameran foto didampingi pimpinan dan anggota DPR RI.

Di tengah-tengah sambutannya, Fadli berharap kerja sama antara DPR sebagai suatu lembaga dan insan media semakin tahun semakin baik. Terutama, dalam mendukung peran media untuk menyuguhkan informasi yang positif kepada khalayak.

“Sehingga kinerja dewan baik di bidang legislasi, pengawasan, anggaran, diplomasi parlemen maupun representasi mewakili suara konstituen bisa tersosialisasi dengan baik,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon dan Pimpinan DPR RI juga secara simbolis memberikan ID Peliputan Pers di Gedung Parlemen kepada lima perwakilan wartawan Koordinatoriat Parlemen.

Sementara itu, Ketua Wartawan Koordinatoriat Parlemen Romdoni Setiawan dalam sambutannya menyatakan, penyerahan ID ini merupakan bentuk komitmen mereka sebagai institusi pers dalam memerangi berita bohong (hoaks).

Ia melanjutkan, untuk memerangi hoaks, Wartawan Koordinatoriat Parlemen akan bersinergi dengan Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, dengan adanya penataan wartawan di lembaga dan instansi negara, maka segala publikasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Mulai tahun ini kita bersinergi dengan dewan pers, wartawan yang tidak terverifikasi dengan dewan pers, tidak diberikan tanda pengenal. Jadi ini juga menjaga DPR sebagai lembaga dan kami sebagai institusi pers,” ujar Romdoni.

Setelah membuka acara pameran foto, Fadli Zon bersama Pimpinan DPR lainnya menuju Gedung Bulat untuk meresmikan Operational Room menjadi ruang Abdul Muis dan ditutup dengan penanaman bibit pohon apel di Lapangan Mini Golf. ■

(ann/sc) Foto : Andri/hr



Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fahri Hamzah menanam pohon dalam rangkaian Hari Ulang Tahun DPR RI ke 72 di Lapangan Golf Mini DPR RI Foto: Andri,Jaka



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Pimpinan BURT DPR meresmikan pergantian nama Operation Room menjadi Ruang Abdul Muis, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang telah di renovasi. Foto: Jaka



Sekretariat Jenderal DPR RI menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 57 ASN di Lingkungan DPR RI atas masa baktinya selama 10, 20, dan 30 tahun. Foto: Runi,Eka